

# KINERJA PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN TNI DALAM PENYIAPAN KEMAMPUAN PRAJURIT TNI GUNA MISI PERDAMAIAN DUNIA

(Studi di Pusat Misi Pemeliharaan  
Perdamaian/PMPP TNI)

I. Gede Sumertha K.Y.<sup>\*)</sup> dan Armaidly Armawi<sup>\*\*)</sup>

*Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1949 telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik kepentingan melalui pengembangan kerjasama internasional demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Dewasa ini konflik yang terjadi pada beberapa belahan dunia mendorong PBB meningkatkan jumlah Operasi Pemeliharaan Perdamaian yang memerlukan respon komunitas internasional baik melalui militer maupun berbagai bentuk operasi keamanan untuk mendorong tercapainya stabilitas dan keamanan sebagai fundamen kehidupan sosial, ekonomi dan perkembangan politik di negara-negara yang sedang mengalami krisis.*

*Indonesia menyadari bahwa dewasa ini keberadaan sebuah negara dalam tatanan dunia internasional tidaklah cukup dengan sekedar meningkatkan produk nasional yang dapat diterima oleh komunitas internasional, lebih jauh dari pada hal tersebut adalah diperlukannya kepedulian dan political will dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara tersebut terhadap trend hubungan internasional didunia yang memiliki kecenderungan keikutsertaan sebuah negara dalam pemberantasan terorisme (Counter Terrorism), bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance/ Disaster Relief) dan suatu peran aktif dibidang Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Support Operation).*

---

<sup>\*)</sup> Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

<sup>\*\*)</sup> Dosen Fakultas Filsafat UGM.

Dalam keikutsertaan Indonesia pada misi perdamaian dunia, ditemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan, berupa kemampuan prajurit tentang pelaksanaan tugas dalam misi perdamaian sesuai standar PBB, yang dapat menghambat pelaksanaan misi secara terintegrasi, dengan pasukan PBB manca negara. Untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam misi perdamaian perlu kiranya dicermati langkah-langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ditemukan PBB dan melaksanakan proses penyiapan personel dan faktor pendukung lainnya untuk mendapatkan standar kemampuan personel dan peralatan yang dibutuhkan PBB sehingga peluang yang terbentang dapat dimanfaatkan oleh TNI.

Langkah-langkah strategis itu diawali dengan pembentukan PMPP TNI sebagai badan pelaksana pusat TNI, yang bertanggung jawab dalam menyiapkan prajurit TNI guna misi perdamaian dunia. Dalam konteks ini kinerja PMPP TNI dalam menyiapkan kemampuan prajurit dipandang perlu untuk dikaji lebih jauh dalam bentuk studi eksplanasi.

#### **Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI**

Untuk menjawab tantangan tugas dan kepercayaan PBB ter-

hadap Indonesia dalam menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian, ditindaklanjuti oleh TNI dengan membentuk suatu organisasi yang disebut Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI melalui Skep Panglima TNI No : Kep/4/I/2007 tentang pembentukan PMPP TNI, Skep Nomor: Kep/5/I/2007 tentang Pokok-pokok organisasi dan prosedur PMPP TNI tanggal 29 Januari 2007 dan Peraturan Panglima TNI No: Perpang/6/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang likuidasi kepabanan VII/OPP Sops TNI. Dengan demikian, semenjak dikeluarkannya Skep dan Perpang tersebut maka PMPP TNI telah disahkan secara hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan misi pemeliharaan perdamaian.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut, maka PMPP TNI mempunyai visi, yaitu menciptakan personel TNI yang profesional dalam mengemban tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian. Sedangkan misi yang diemban adalah berperan aktif dalam mendukung misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui penyelenggaraan kegiatan pembekalan, pelatihan dan pendidikan serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan SDM personel TNI.

Tugas pokok PMPP TNI adalah merencanakan dan menyiapkan

kan personel TNI dalam penguasaan, pelatihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri dalam ruang lingkup operasi pemeliharaan perdamaian. Bila melihat tugas PMPP TNI tersebut maka peran PMPP TNI kedepan akan semakin penting dalam mengimplementasikan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sementara itu, fungsi PMPP TNI, adalah: (a) Merumuskan, merencanakan, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penerimaan misi perdamaian, (b) menyelenggarakan kegiatan latihan serta memelihara kemampuan personel maupun satuan TNI yang dipersiapkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian, dan (c) merencanakan kebutuhan operasi, administrasi dan logistik dalam rangka pelaksanaan latihan bagi personel dan Satuan TNI yang disiapkan untuk melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian.

Secara umum, struktur organisasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas: (a) Kepala PMPP TNI yang dipimpin oleh Pati berpangkat Brigadir Jenderal, (b) wakil Kepala PMPP TNI yang dijabat oleh Pamen berpangkat kolonel, (c) kepala Tata Usaha dan Urusan

Dalam yang dijabat oleh Pamen berpangkat Letkol sebagai pembantu utama Ka PMPP TNI di bidang administrasi dan pelayanan, (d) direktur Perencanaan dan Operasi yang dijabat oleh Pamen berpangkat Kolonel, (e) direktur Latihan yang dijabat oleh Pamen berpangkat Kolonel, dan (f) direktur Administrasi yang dijabat oleh Pamen berpangkat Kolonel.

### **Kemampuan Prajurit TNI guna Misi Perdamaian Dunia**

Prajurit TNI yang disiapkan guna misi perdamaian dunia harus mempunyai kemampuan dasar tempur, kesehatan, fisik, dan bahasa Inggris. Kemampuan dasar tempur telah dilatihkan dalam pendidikan dasar kemiliteran, dan selanjutnya diasah kemampuannya melalui pelaksanaan latihan sehari-hari di satuan, setiap prajurit diharapkan harus mempunyai kemampuan dasar tempur yang akan berguna dalam mengemban misi perdamaian dunia.

Kemampuan kesehatan dari prajurit TNI sebagai persyaratan misi perdamaian, dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan tahap I dan II. Pemberitahuan awal ke masing-masing Angkatan melalui surat telegram akan membantu kesiapan awal calon peserta *peacekeeper*. Diharapkan para prajurit TNI yang

mengemban misi perdamaian dunia, tidak hanya sehat secara fisik, yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan tubuh, meliputi tes darah, rontgen, postur tubuh, dan lain-lain, melainkan juga mempunyai kesehatan jiwa yang matang. Untuk itu, para prajurit juga harus lulus ujian tes kejiwaan dan psikologi. Pelaksanaan test kejiwaan dan test *psychology* tertulis untuk mengetahui karakter personil yang akan bertugas dalam misi perdamaian sehingga diharapkan memiliki moral, kode etik, kepemimpinan dan dedikasi tugas yang baik.

Kemampuan fisik prajurit yang dimiliki oleh setiap personil *peacekeeper* memiliki kriteria khusus. Berbeda dengan penugasan dalam negeri yang cenderung tidak melaksanakan seleksi kesamptaan jasmani, dalam misi perdamaian dunia, setiap calon personil diseleksi untuk dapat melewati batas minimum nilai kesamptaan jasmani prajurit, yakni 61. Tes kesamptaan jasmani ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan fisik prajurit dihadapkan kepada tantangan medan dan iklim yang berbeda dengan di tanah air.

Kemampuan bahasa Inggris merupakan penampilan profesionalisme dalam penugasan internasional, khususnya bagi pa-

ra perwira. Bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi antar bangsa. Kemampuan seorang perwira dalam berbahasa ini tampak pula ketika bersosialisasi dengan perwira dari negara lain. Bahkan di medan operasi, yang nyata-nyata berhubungan dengan pemahaman akan prosedur dan aturan yang harus dilakukan oleh para prajurit, kesalahfahaman sebagai akibat berbahasa ini akan banyak mempengaruhi bahkan merusak keberhasilan pelaksanaan tugas yang sedang dilakukan. Dengan demikian, bahasa standar dan aturan universal dari komunikasi antar budaya yang dimengerti oleh semua bangsa harus dikuasai para perwira. Untuk itu, dalam kerangka lintas budaya (*cross culture*), bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa internasional, menjadi kunci masuk dalam pergaulan tugas internasional.

Dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian, faktor penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris dan atau bahasa Perancis) menjadi persyaratan mutlak untuk dikuasai khususnya bagi unsur pimpinan. Untuk mendapatkan personil yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, dilaksanakan tes bahasa Inggris dalam bentuk *listening, writing, reading, speaking* dan paparan dalam bahasa Ing-

gris dengan menggunakan *slide power point*.

Adapun, standar kelulusan dari masing-masing materi seleksi (kecuali Bahasa Inggris) ialah sesuai dengan standar kelulusan prajurit TNI. Sedangkan, standar untuk Bahasa Inggris bervariasi sesuai dengan kepangkatan dan macam penugasan sebagai berikut: (a) standar kelulusan dasar (*elementary*) pada Bintara dan tamtama Satgas, (b) standar kelulusan *intermediate* untuk Perwira Satgas, dan (c) standar kelulusan *advance* untuk Dansatgas, Milobs, dan Milstaff.

### **Kinerja PMPP TNI.**

PMPP TNI selaku pelaksana kegiatan penyiapan Satgas TNI telah berkoordinasi dengan Mabes TNI dan ketiga Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) guna mengimplementasikan proses perencanaan, penyiapan dan pemberangkatan. Pemilihan personel dilaksanakan melalui seleksi yang bersifat umum dan tetap mengacu kepada standar yang telah ditentukan oleh PBB. Sumber personil TNI diambil dari ketiga angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dengan sistem seleksi yang telah ditentukan sesuai kebutuhan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian.

PMPP TNI menjabarkan Direktif Panglima TNI untuk me-

rencanakan proses seleksi personel tingkat pusat. Materi seleksi meliputi: Kesehatan 1 dan 2. Kesehatan Jiwa (Keswa), Bahasa Inggris, Mengemudi (Stir kiri), Komputer (e-mail dan MS office), Kesehatan Jasmani.

Dihadapkan pada bentuk-bentuk tantangan yang terdapat dalam konflik *intra state* pasca perang dingin dan beban tugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian yang bersifat multidimensional, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh PMPP TNI untuk menunjukkan kinerja optimalnya dalam melatih prajurit TNI guna misi pemeliharaan perdamaian PBB, yakni (a) melaksanakan latihan penyiapan (*pre-deployment training*) sesuai dengan standar PBB baik teori maupun aplikasi dan (b) pengiriman Personel PMPP TNI Untuk Mengikuti Kursus Misi Perdamaian PBB di Luar Negeri.

Bila negara telah menyanggupi pengiriman pasukan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah proses Administrasi dan perencanaan kebutuhan logistik. Untuk dukungan prajurit TNI pada saat latihan, alat peralatan yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan jenis tugas yang akan dilaksanakan, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi pemeliharaan perdamaian akan disesuaikan dengan standar PBB yang telah di-

gariskan dalam MOU dan *manual book* yang telah dikeluarkan oleh PBB.

### **Tantangan dalam Penyiapan Kemampuan Prajurit TNI**

Ada dua tantangan dalam penyiapan kemampuan prajurit TNI, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan Internal terdiri dari, pertama, rekrutmen dalam pelaksanaan perekrutan personil untuk tugas misi perdamaian dirasakan masih tumpang tindih, khususnya dalam penyiapan *military observer* dan *military staff* masih ditangani bersama dengan Spers Mabes TNI yang mengakibatkan terjadinya dualisme dalam mengambil kebijakan. Tantangan lain dalam proses rekrutmen adalah adanya kebijakan yang berbeda dari tiap Mabes Angkatan. Mekanisme yang selama ini dilaksanakan dalam penyiapan personil, masing-masing angkatan mempunyai kebijakan tersendiri. Seperti di Angkatan Darat, penyiapan personil dalam rangka rotasi satgas kontingen Garuda dipersiapkan dari satuan Batalyon yang menjadi juara dalam lomba Pembinaan Satuan (Binsat). Angkatan Laut personil dipersiapkan menitik beratkan dari korps Marinir. Sedangkan dari Angkatan Udara personil yang dipersiapkan dari korps Pasukan Khas (Paskhas).

Kedua, Pre Deployment Training saat ini, PMPP TNI belum memiliki tempat pelatihan permanen yang dapat melaksanakan pelatihan Milobs, Milstaff, dan Satgas secara terpadu. Demikian juga kesiapan alat pendukung latihan. Kegiatan manuver lapangan membutuhkan bukan hanya medan latihan yang mendekati AOR tetapi juga dukungan bahan bakar dan alat peraga *Major Equipment*, seperti contoh panzer, mobil *military pattern*, alat berat zeni, truk angkutan dan dump truk. Alat-alat berat ini sifatnya pinjaman dari satuan-satuan TNI AD,AL.

Tantangan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi PMPP TNI adalah menjadikan Indonesia sebagai *Centre of Excellent (CoE)* dibidang *Civil-Military Cooperation (CIMIC)*. Konsep CIMIC yang berasal dari budaya Indonesia, terbukti sangat efektif dan berhasil dengan baik ketika dilaksanakan dalam misi pemeliharaan perdamaian di UNIFIL Libanon. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan piranti lunak/juklak misi perdamaian sebagai referensi untuk melaksanakan latihan yang masih sangat terbatas sehingga pelaksanaan latihan operasi perdamaian di matra Angkatan jarang bahkan tidak pernah dilaksanakan.

Kebijakan pelaksanaan latihan misi perdamaian saat ini

dilaksanakan secara sentralistik oleh PMPP TNI dalam rentang waktu 30 hari yang barang tentu tidak mencukupi untuk mengasah kemampuan prajurit sehingga dapat memenuhi kebutuhan sesuai standar PBB. Meningkatkan kemampuan prajurit seharusnya telah dilakukan sedini mungkin melalui program pembinaan latihan di matra Angkatan masing-masing, sehingga latihan yang dilaksanakan oleh PMPP TNI lebih bersifat pembulatan, tidak banyak lagi memoles tentang *basic* militer. PMPP TNI juga masih tergantung kepada satuan lain dalam kesiapan pelatih. Kesiapan para *trainers* yang diambil dari anggota-anggota mantan misi milobs, milstaf dan kontingen, sangat tergantung kepada kesibukan satuannya masing-masing.

Ketiga Dukungan Administrasi tantangan bagi PMPP TNI tidaklah ringan, diperlukan kerjasama yang terpadu dengan setiap satuan kerja dilingkungan TNI guna penyiapan *UNSAS* yang akan ditugaskan dalam suatu misi pemeliharaan. Selain itu, perlu adanya dana cadangan khusus dalam rangka mengantisipasi permintaan PBB kepada Indonesia untuk mengirimkan prajurit TNI pada misi perdamaian dunia.

Tantangan Eksternal terdiri dari pertama, spektrum kegiatan

misi perdamaian meski isu global saat ini terpetakan kepada empat *issue* yaitu *Peacekeeping operations*, *Disaster Relief/Humanitarian Assistance*, *Combatting Terrorism* dan *Leadership*, namun pada awalnya selama 45 tahun pertama keberadaan PBB lebih terfokus kepada *Peacekeeping operations* yang bersifat relatif sederhana, dimana upaya-upaya yang dilaksanakan lebih tertuju kepada pengawasan terhadap jalannya gencatan senjata antara negara yang bertikai.

Kedua *United Nations Standby Arrangement System (UNSAS)* hambatan yang ditemui dalam penerapan dilapangan terhadap prinsip *consent* merupakan kelemahan proses perencanaan sebelum digelarnya PKO.

Ketiga, *Standby Force* menyadari pentingnya *Standby Forces* bagi Indonesia, TNI melalui PMPP TNI telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan membuat beberapa kajian/tealaahan akan perlunya kesatuan pandangan dikalangan TNI tentang institusi yang sepenuhnya berwenang menyiapkan personel TNI yang akan ditugaskan dalam suatu misi pemeliharaan perdamaian. TNI mempelajari bahwa status *UNSAS* tidak hanya semata-mata melakukan kesiapan personel namun dapat sekaligus diparalelkan dengan kesiapan Indonesia dalam meng-

hadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Ketiga Human Resources, sangat sedikit prajurit dari negara kawasan Asia Tenggara dan Timur -kecuali Singapura dan Filipina- yang mampu berbahasa Inggris. Ini mempengaruhi tingkat kemampuan prajurit dalam melaksanakan tugas operasi perdamaian. Meskipun PBB melalui telah melakukan upaya-upaya untuk memperkecil *gap* kemampuan diantara TCC melalui pelatihan, kursus dan seminar yang bersifat regional maupun internasional, namun hal ini tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan upaya yang dilakukan oleh TCC sendiri untuk meningkatkan kemampuan prajuritnya dalam operasi perdamaian.

Keempat Mandat PBB mandat PBB berbeda di setiap misi, tergantung dari sifat/bentuk konflik dan tantangan/masalah yang dihadapi. Ketika misi perdamaian digelar biasanya ditunjukkan untuk mendukung implementasi gencatan senjata atau lebih dari itu untuk mendukung perjanjian damai secara komprehensif. Mandat PBB dipengaruhi oleh bentuk dan isi perjanjian damai yang disepakati oleh partai yang berkonflik, dan juga selalu menggambarkan bentuk pembahasan menurut kaidah-kaidah yang lebih luas dalam ruang lingkup internasional.

### **Pengakuan Dunia Internasional**

Dampak positif dari peran Indonesia dalam misi perdamaian, seperti keterlibatan Indonesia di UNIFIL Libanon telah mendapat pengakuan langsung dari *Force Commander* UNIFIL dan para pejabat tinggi PBB lainnya. Indonesia memiliki pandangan bahwa keberhasilan dari suatu misi perdamaian sangat bergantung kepada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh anggota PBB, yaitu: persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai (*consent*), memiliki mandat yang jelas, *impartiality*, dan *non-use of force* kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diemban dari PBB.

Ukuran keberhasilan suatu misi perdamaian dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran misi perdamaian seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik. Oleh karena itu, dimensi *post conflict peace building* perlu dipertimbangkan sejak awal penggelaran pasukan perdamaian.

### **Kesimpulan**

Sebagai satu-satunya badan yang menangani masalah misi perdamaian, PMPP TNI berperan tidak hanya memilih personil yang *eligible* melalui sistem *recruitment* tetapi juga berperan

untuk meningkatkan kemampuan personil TNI melalui program latihan yang di *design* untuk menjawab kebutuhan operasional dalam menghadapi kompleksitas misi perdamaian saat ini dan yang akan datang. Namun demikian, PMPP TNI menyadari untuk menjalankan peran dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, masih banyak menemui tantangan yang harus dihadapi, yang secara dominan lebih bersifat dari dalam lingkungan TNI.

Diperlukan tindakan yang pro aktif dan responsif dari segenap institusi dilingkungan TNI untuk memahami perkembangan dan nuansa misi pemeliharaan perdamaian saat ini, sehingga setiap bagian menyadari peran dan fungsi masing-masing untuk menunjang penyelenggaraan misi pemeliharaan perdamaian. Menilik dari situasi tersebut, maka sudah sewajarnya PMPP TNI ditempatkan sebagai institusi yang sepenuhnya menangani semua isu yang berkaitan dengan *United Nations Peacekeeping Operation*. Karena selama ini, data dan fakta menunjukkan bahwa PMPP TNI telah melakukan kinerja terbaiknya dalam proses seleksi, pelaksanaan kegiatan latihan (PDT), dan dukungan administrasi serta *deployment* pasukan TNI guna misi perdamaian dunia, dengan ditunjukan oleh surat penghargaan dari berbagai

pihak terhadap Kontingen Garuda maupun PMPP TNI, serta meningkatnya permintaan pasukan dari UNDPKO terhadap Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- African Union, 2006, *Policy framework for the African Standby Force and military staff committee*, Addis Ababa, Ethiopia.
- As'ad, M, 1982, *Psikologi Industri: Seri Sumber Daya Manusia*, Liberty, Yogyakarta.
- Battistelli F., 1997, *Peacekeeping and the postmodern soldier, Armed Forces & Society*, Franco Angeli, Milan.
- Bernadin H. John and Joyce E.A. Russel, 1993, *Human Resources Management*, Mc. Grow Hill, Inc. Singapore.
- Dharma, A., 1986, *Manajemen Prestasi Kerja*, Rajawali, Jakarta.
- DoD Inspector General of US, 1994, *Specialized military training for peace operations, Program Evaluation*, Department of Defense of US, Washington
- Downes. C, 1993, *Challenges for smaller nations in the new era of U.N. Multinational Operations*. In Hugh Smith (Ed), *Peacekeeping: Challenges for the future*, Australian De-

- fence Studies Canberra.
- Durch, W.J., 1993, *Running the Show: Planning and implementation*, St Martin's Press, New York.
- Everts, P, & Isernia, P, 2001, *Public opinion and the international use of force*, Routledge, London.
- G8 Action Plan, 2004, *Expanding Global Capacity for Peace Support Operations*, Summit Document.
- Goldstein, I.L., 1993, *Training in organizations*, Pacific Grove, Brooks/Cole, California.
- Hariman, T. dan R.L. Hilgert, 1982. *Supervision Konsep and Practice of Management. Third Edition*. South Western Publishing Co. Cincinnati, Ohio.
- Helfert, Erich A. 1991, *Techniques of Financial Analysis, Seventh Edition*. Homewood : Ricard D. Irwin Inc., Illinois.
- Kidwell, B, & Langholtz, H.J, 1998, *Personel selection, preparation, and training for U.N peacekeeping missions*, CT: Praeger, Westport.
- Konga XXIII-C/UNIFIL, 2009, *Buku Kenangan, Perjalanan Satgas Konga XXIII-C/UNIFIL di Lebanon*, Jakarta
- Konga XXVI-A/UNIFIL, 2009, *Buku Kenangan Satgas FHQ-SU TNI Konga XXVI-A/UNIFIL*, Jakarta.
- Kraiger K., & Jung K., 1997, *Linking training objectives to evaluation criteria*, Washinton DC.
- Kutter, W.D, 1998, *Operational guidelines for U.S. peacekeeping commanders*, Carlyle Barracks, PA :US Army War Collage, Washington.
- Prawirosentono, S., 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja. Karyawan*, BPFE, Yogyakarta.
- Roy, A.L and Malcorra, S., 2009, *A New Partnership agenda; Charting a New Horizon for UN Peacekeeping*, Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, United Nations, New York.
- Sabol, M.A & Whisher, R.A, 2001, *Retention and reacquisition of military skills*, Military Operation Research.
- Swasto Bambang, 1996, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Imbalan*, Cetakan Pertama Unibraw, Malang.
- Thomas W. Britt Amy B. Adler, 2003, *The Psychology of The Peacekeeper: Lessons from the Field*, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 USA.
- Van der Meulen, J. (1997). *Post-modern societies and future support for military mission*, Kluwer Law International,

The Hague.

Whisher, R, Sabol, M, & Ozkaptan, H, 1996, *Retention of "peace support operation" task during Bosnia deployment: A basis for refresher training*, US Army Research Institute for the Behavioral and Social Science, Virginia.

### Majalah

Anonim, 2008, *Unifil Female Peacekeepers Together We Stand United for Peace*, UNIFIL MAGAZINE Vol. 35 No.02, Juli 2008,

Anonim, 2008, *Youthful Perspective*, UNIFIL MAGAZINE, No 03 September 2008,

### Internet

[http://en.wikipedia.org/wiki/Indian\\_Armed\\_Forces](http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Armed_Forces)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Military\\_of\\_Pakistan](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Pakistan)

<http://un.org/chinese/work/peace/rapid/sys.htm>

### Buku Petunjuk/Surat Keputusan

Canadian Forces, 2000, *Peace Support Operations Field Manual*, Canadian, Ottawa.

Departemen Pertahanan RI, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta.

Laporan Evaluasi Kegiatan PMPP TNI tahun 2009.

Laporan Evaluasi Kegiatan PMPP TNI tahun 2010.

Peraturan Panglima TNI nomor Perpang /14/III/2009 tanggal 27 Maret 2003 tentang Naskah Sementara Mabes TNI Bujukin OMSP.

Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/20/IV / 2008 tanggal 22 April 2008 tentang Prosedur dan mekanisme kerja PMPP TNI.

United Nations, 2011, *Article 1: The purpose of the United Nations, UN Charter*, Secretary of the Publications Board of United Nations, New York

United Nations, 2011, *Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, And Acts Of Aggression, UN Charter*, Secretary of the Publications Board of United Nations, New York.

United Nations, 2001, *Leadership training module*, Publication, New York.

United Nations, 2007, *Peacekeeping Manual Book*, Publication, New York.

United Nations Conference, 2007, Beijing,

United Nations Peacekeeping Operations, 2008, *Principal and Guidelines*, New York.

United Nations Peace Support Operation Conference Files, 2008.